



Pemerintah Kabupaten Grobogan

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
Jl. D. I. Panjaitan No.6, Brambrangan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan

**Pemerintah Kabupaten Grobogan**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. D. I. Panjaitan No.6, Brambrangan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan telah tersusun. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini.

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD adalah rancangan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini akan menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang mengambil tema "*Penguatan Daya Saing SDM, didukung Peningkatan Reformasi Birokrasi*".

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Bab III Tujuan dan Sasaran, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Bab V Penutup.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan ini disusun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak terkait.

Purwodadi, Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN GROBOGAN



**Drs. DARU WISAKTI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690511 199001 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan program dan kegiatan pada jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 sehingga harus melakukan evaluasi terhadap pencapaian Sasaran pada tahun pertama untuk dapat ditingkatkan pada tahun seterusnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (1) "urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (5)" meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan;
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Kemudian di Kabupaten Grobogan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan.

Dengan perencanaan serta penetapan target yang akurat dan Rencana Kerja tentunya akan mempermudah pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan dalam akhir periode tahunan nantinya, sehingga akan mempermudah pula dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Akhirnya dapat dilihat pada tercapainya peningkatankinerja serta terwujudnya akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan. Informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan dalam Perangkat Daerah akan mengacu dan berpedoman pada Peraturan dimaksud.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
- 11 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan;
- 12 Peraturan Bupati Grobogan Nomor     Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka sepenuhnya program dan kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada satu tahun kedepan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan daerah jangka pendek (satu tahun) sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023, sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan target capaian sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**1.4 Sistematika Dokumen Renja**

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan, Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam Bab III berisi mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran di Tahun 2022 tidak lepas dari dukungan dana yang ada. Adapun dana yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebesar Rp.9.280.246.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.978.837.341,00 (96,75%) dari jumlah dana tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada termasuk kegiatan rutin. Adapun Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 4.114.908.250,00 terealisasi sebesar Rp. 4.003.014.326,00 atau 97,28% capaian kinerja dari 7 (tujuh) kegiatan ini masing-masing tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Tertib administrasi surat menyurat, pembayaran listrik, telepon dan air;
2. Kelancaran operasional kantor;
3. Tersusunnya Dokumen perencanaan dan laporan keuangan tahunan;
4. Tertibnya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
5. Terwujudnya Pakaian Dinas dan Atributnya;
6. Terwujudnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung serta sarana dan prasarana Gedung kantor;
7. Terwujudnya makan minum rapat, makan minum aktivitas lapangan dan makan minum harian pegawai;
8. Kebutuhan barang cetak dan penggandaan;

9. Terpenuhinya kebutuhan ATK dan peralatan kantor;
10. Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

**2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 203.380.000,00 terealisasi sebesar Rp. 183.227.000,00 atau 90,09% capaian kinerja dari kegiatan ini masing-masing tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Terlaksananya upacara peningkatan wawasan kebangsaan
2. Terlaksananya pemahaman kepada generasi muda/pelajar tentang nilai-nilai Pancasila dan bhineka tunggal ika
3. Terlaksananya gerak jalan peningkatan wawasan kebangsaan

**3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik .

Program ini mendapat alokasi dana Rp 300.000.000,00 terealisasi Rp. 277.586.848,00 atau 92,53% capaian kinerja dari kegiatan tersebut tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Sosialisasi perundang-undangan politik;
2. Bimtek LPJ Laporan Keuangan Partai Politik,
3. Terlaksananya Koordinasi Forum-forum diskusi politik;
4. Terlaksananya Sosialisasi verifikasi bantuan keuangan partai politik.

**4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 4.135.338.000,00 terealisasi Rp. 3.991.649.167,00 atau 96,53% adapun capaian kinerja dari kegiatan tersebut tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Tersalurkannya Hibah/bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Ormas/LSM;
2. Terlaksananya pembinaan Ormas dan LSM
3. Terlaksananya Hibah Barang dan Uang untuk Ormas, LSM dan



Pemerintah Pusat

4. Terlaksananya sosialisasi kepada Ormas/LSM;

**5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program ini mendapat alokasi dana Rp.176.620.000,00 terealisasi sebesar Rp.174.520.000,00 atau 98,81% capaian kinerja tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Pembinaan Generasi Pemuda Lintas Agama;
2. Pelaksanaan Focus Grup Discusion (FGD) Kerukunan Umat Beragama;
3. Sosialisasi tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
4. Pembinaan dan sosialisasi kepada penganut penghayat kepercayaan.

**6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 348.840.000,00 atau 99,67% capaian kinerja tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Rapat koordinasi Forkopimda;
2. Pelatihan Intelijen bagi Tim Kewaspadaan Dini Daerah;
3. Pembinaan generasi muda dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme;
4. Pagelaran Seni Budaya dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional
5. Penyelesaian konflik sosial;

**Pengukuran Kinerja Program Bakesbangpol  
Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya Cakupan pencegahan konflik	Prosentase cakupan pencegahan dini potensi konflik	100%	100%	100%	Baik

**Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :**

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Cakupan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	Baik

**Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :**

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	64%	63,56%	100%	Baik

**Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :**

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan

[illegible]

8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	64	64	64	64	100	64	64	100
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	64	63,58	64	63,58	99,34	64	63,58	99,34

8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada generasi muda (SMP/ MTS)	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	100	100	100	100	100	100	100	100

## **2.2 Analisis Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan melaksanakan tugas dan pokok fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah

Secara rinci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan mempunyai Fungsi yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka tertib administrasi dan sahnya suatu organisasi

kemasyarakatan (Ormas), Badan Kesbangpol Kabupaten Grobogan memberikan pelayanan kepada Ormas yang akan mengajukan persyaratan guna mendapatkan Surat Ketetapan Terdaftar dari Kemendagri serta Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) bagi Tenaga Kerja Asing yang berada di Kabupaten Grobogan.

Terhadap Ormas yang mengajukan permohonan, Badan Kesbangpol memverifikasi berkas ajuan, cek di lapangan serta membuat Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Unit Layanan administrasi ( ULA ) di Jakarta.

Disamping pelayanan permohonan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas, Surat Keterangan Tanda Lapor bagi Tenaga Kerja Asing, Badan Kesbangpol juga memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun instansi terkait yang membutuhkan data/informasi.





### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan**

Sejak era reformasi, kehidupan demokrasi, kehidupan politik nasional mengalami kemajuan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal seperti ini satu sisi menjadi hal yang merupakan kemajuan, namun disatu sisi juga merupakan menjadi hal yang perlu disikapi, karena hal tersebut telah merubah pola kehidupan masyarakat. Masyarakat sering bertindak individualistis dan berkelompok. Masyarakat, telah mengadopsi budaya baru yang belum sepenuhnya dipahami serta diyakini kebenaran dan kesesuaian dengan karakter bangsa. Nilai – nilai luhur bangsa dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan di era sekarang.

Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai- nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang jauh berbeda dengan nilai – nilai Pancasila. Hal seperti ini terlihat pada kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi dalam menyelesaikan masalah bangsa.

Pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai – nilai luhur Pancasila dewasa ini juga dinilai telah memudar. Utamanya di kalangan generasi muda. Wawasan kebangsaan menjadi hal yang abstrak dan jauh dari pemahanan di kalangan generasi muda.

Demokrasi yang berlebihan dan memudarnya pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, menjadi masalah yang krusial bagi pemerintah saat ini, disamping majunya pembangunan nasional yang bisa menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Pro kontra yang terjadi akibat pembangunan infra struktur di masyarakat juga harus disikapi oleh pemerintah.

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Grobogan. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dinamika yang berkembang pada saat terakhir menunjukkan adanya potensi resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam daerah yang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rencana kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang sampai saat ini masih menjadi polemik yang cukup hangat. Perbedaan kepentingan yang terjadi bukan hanya secara vertikal yang melibatkan antara masyarakat dan pemerintah, namun juga secara horizontal yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kelompok masyarakat yang setuju. Apabila tidak dikelola dengan baik maka perbedaan kepentingan ini akan menjadi bersifat terbuka dan dikhawatirkan apabila ini terjadi dampaknya akan dapat 16 mengganggu jalannya pembangunan. Di samping persoalan di atas, kondisi kemiskinan kemungkinan juga akan menjadi faktor determinan bagi munculnya tindak kriminal dan

kejahatan yang dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut menjadi permasalahan yang krusial pada penciptaan keamanan daerah, yang pada akhirnya visi Kepala Daerah berupa terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya akan sulit untuk diwujudkan.

Keamanan daerah dapat tercipta apabila kondisi masyarakat stabil didukung dengan pemahaman akan hak dan kewajiban masing – masing, serta loyalitas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diwujudkan dengan tingginya rasa nasionalisme masyarakat.

Sesuai dengan uraian diatas maka dirumuskan isu isu yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja SKPD antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya rasa Nasionalisme dan jati diri bangsa serta kurangnya wawasan kebangsaan,
2. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila pada semua elemen masyarakat
3. Masih kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah
4. Masuknya budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat
5. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan
6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
7. Masih kurangnya masyarakat yang memahami kebijakan politik
8. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
9. Masih adanya Ormas dan LSM yang belum terdata
10. Masih banyaknya warga negara asing yang tidak terpantau
11. Belum efektivitasnya penanganan konflik social secara terkoordinir dan terpadu
12. Masih rendahnya perolehan nilai SAKIP

Peluang Pengembangan :

1. Ketersediaan media informasi
2. Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi politik

Guna menjawab tantangan dan permasalahan seperti tersebut diatas, perlu diciptakan masyarakat yang aman, tenteram serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Diperlukannya peningkatan wawasan kebangsaan pada masyarakat, sehingga akan mendukung stabilitas keamanan daerah yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah daerah.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2021-2026 dan dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan. Review terhadap Rancangan Awal Renja/ Renstra OPD Kabupaten Grobogan, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100 %	3.613.457.266	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100 %	4.752.594.000	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD			
			Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko			
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	1 Dok	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	7.500.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Grobogan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Grobogan	Jumbnjlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	7.500.000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dok	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	7.500.000	
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Grobogan	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 bln	2.216.557.966	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Grobogan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 org	2.792.035.000	

[illegible]

1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Grobogan	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	12 bln	14.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Grobogan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Grobogan	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Grobogan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.768.000	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Grobogan	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln	93.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Grobogan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104.000.000	
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Grobogan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bln	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Grobogan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	123.945.000	
2.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Grobogan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluair	12 bln	10.197.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Grobogan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 unit	10.197.000	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Grobogan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12 bln	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Grobogan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	722.015.000	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Grobogan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bln	16.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Grobogan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	17.110.000	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Grobogan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	100%	196.709.136	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Grobogan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	100%	645.100.000	
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Grobogan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	100%	196.709.136	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Grobogan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	300 orang	645.100.000	

								Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Kab. Grobogan</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	64%	169.260.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Kab. Grobogan</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	64%	2.384.835.000	
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan bidang politik	1000 orang	60.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 orang	2.384.835.000	
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Kab. Grobogan</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	20%	3.757.898.914	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Kab. Grobogan</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	20%	127.417.662.000	
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah peserta pembinaan ormas dan LSM	700 orang	3.707.898.914	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	750 orang	127.267.662.000	

	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah ormas/ LSM yang mendapatkan sosialisasi	250 orang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	150.000.000	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Kab. Grobogan</b>	<b>Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>170.826.864</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Kab. Grobogan</b>	<b>Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>581.316.000</b>	
<b>A</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>										
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Perda P4GN (Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,)	1 Dok	50.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dok	237.100.000	
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah peserta sosialisasi (P4GN)	150 orang	170.826.864	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	344.216.000	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN</b>	<b>Kab. Grobogan</b>	<b>Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan,</b>	<b>100%</b>	<b>202.520.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN</b>	<b>Kab. Grobogan</b>	<b>Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan,</b>	<b>100%</b>	<b>929.237.000</b>	



	<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		pengembangan dan pelatihan deteksi dini			<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		pengembangan dan pelatihan deteksi dini			
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah peserta FGD penanganan konflik sosial	550 orang	202.520.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<b>Kab. Grobogan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 orang	929.237.000	

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang RKPD yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai keberlanjutan Pembangunan nasional tahun 2019 – 2024 telah menghasilkan kemajuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan telah meletakkan landasan yang kuat bagi Kabupaten Grobogan untuk melanjutkan pembangunan pada tahun yang akan datang. Pencapaian target pembangunan selama RPJMD 2021 – 2026.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2024 yaitu “ **Penguatan Daya Saing SDM, didukung Peningkatan Reformasi Birokrasi** ”

Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian prioritas optimalisasi tata kelola pelayanan publik dengan pelaksanaan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan sumber daya kondisi aktual dan kemampuan keuangan daerah selama 1 ( Satu ) tahun anggaran maka arah pembangunan selama 1 tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah yang mendesak sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2024.

Melalui eksplorasi terhadap Lingkungan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan dapat diidentifikasi lingkungan internal sebagai berikut :

**Lingkungan Internal :**

a. Dukungan SDM / Pegawai

Sumber Daya Manusia di Badan Kesbangpol Kabupaten Grobogan sampai pada saat ini berjumlah 21 orang ASN dan 8 orang Tenaga Honorer. Dengan Keadaan pegawai yang terbatas Badan Kesbangpol masih membutuhkan personil karena masih ada formasi yang belum diisi. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol secara optimal maka diperlukan penambahan SDM baik kualitas maupun kuantitas

b. Peralatan / Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memenuhi kebutuhan. Jumlah kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda dua maupun kendaraan dinas roda empat belum memenuhi kebutuhan, jika dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang ada. Juga masih diperlukannya ruang laktasi dan ruang bermain anak.

**3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu<sup>26</sup> dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan

diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dari misi yang telah dirumuskan, yaitu :

Tujuan tersebut adalah :

● **Meningkatkan penanganan konflik sosial**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuanyang sebenarnya. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan atau kelompok sasaran yang dilayani. Penetapan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran tersebut adalah :

- 1. Meningkatnya cakupan pencegahan konflik**
- 2. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan**
- 3. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat**
- 4. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan urusan penunjang kesatuan bangsa dan politik**

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	<b>Meningkatkan penanganan konflik sosial</b>	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>
1.1	Meningkatnya cakupan pencegahan konflik	Prosentase cakupan pencegahan dini potensi konflik
1.2	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan	Prosentase peningkatan cakupan Wawasan Kebangsaan
1.3	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu
2	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>
2.1	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan urusan penunjang kesatuan bangsa dan politik	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan

Uraian	Indikator	Rumus	Realisasi 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
Meningkatkan penanganan konflik sosial	Presentase penurunan konflik sosial		100	100	100	100	100

Sasaran

Uraian	Indikator	Rumus	Realisasi 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
Meningkatnya cakupan pencegahan konflik	Prosentase cakupan pencegahan dini potensi konflik	Jumlah konflik yang tertangani tahun ini : jumlah konflik tahun ini x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan	Prosentase peningkatan cakupan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan wawasan kebangsaan : Jumlah masyarakat Kabupaten Grobogan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	Presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik : Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan x 100%	63,56%	64%	64%	>64%	>64%
Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan urusan penunjang kesatuan bangsa dan politik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Menggunakan rumus dan metode dari KemenPAN-RB	B	B	B	BB	BB

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Grobogan adalah "Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya".

Untuk mencapai Visi tersebut maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Dari visi bupati terpilih kabupaten Grobogan yaitu " Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya", maka visi tersebut sangat berkaitan dengan tupoksi Badan Kesbang dan Politik. Sebab masyarakat Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya tidak bisa dilepaskan dari keamanan dan kenyamanan masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, ideologi, budaya, kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan. Sementara aspek sosial, politik, ideologi, budaya, kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan adalah bagian pokok dari tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik kabupaten Grobogan.

Sedangkan dari misi bupati terpilih sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang dan Politik kabupaten Grobogan adalah misi yang kelima yaitu "Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat" sedangkan untuk kelancaran reformasi birokrasi juga mendukung misi keempat yaitu "Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik". Alasannya adalah, salah satu tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik kabupaten Grobogan adalah "Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional, melaksanakan penguatan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, penguatan kewaspadaan nasional di daerah, cipta situasi kondisi daerah yang kondusif dan upaya koordinasi dalam penanganan konflik yang ada di masyarakat".

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial





Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							136.710.744.000,00		9.747.572.000,00				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							136.710.744.000,00		9.747.572.000,00				
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							136.710.744.000,00		9.747.572.000,00				
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							645.100.000,00		650.000.000,00				
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							645.100.000,00		650.000.000,00				
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
						Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 %	300 Orang	100 Persen	645.100.000,00	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	650.000.000,00

8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							2.384.835.000,00					1.830.000.000,00	
8	01	03	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							2.384.835.000,00					1.830.000.000,00	
8	01	03	2.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						Persen tase partisipasi masyarakat dalam Pemilu kada	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosen tase partipasi masyarakat dalam Pemilu kada	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	>64 %	300 Orang	>64 Persen	2.384.835.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politikdi Daerah	300 Orang	1.830.000.000,00
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							127.417.662.000,00					1.630.000.000,00	
8	01	04	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							127.417.662.000,00					1.630.000.000,00	
8	01	04	2.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													

						Persentase Organisasi Kemasyarakan yg dibinadan mendapatkan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakan yg dibinadan mendapatkan pengawasan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	20 %	750 Orang	20 Persen	127.267.662.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 Orang	1.530.000.000,00
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						Persentase Organisasi Kemasyarakan yg dibinadan mendapatkan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakan yg dibinadan mendapatkan pengawasan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	20 %	250 Orang	20 Persen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	100.000.000,00
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								581.316.000,00					444.216.000,00
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								581.316.000,00					444.216.000,00
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													

						Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 Persen	237.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
						Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 %	150 Orang	100 Persen	344.216.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	344.216.000,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								929.237.000,00				900.296.000,00	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								929.237.000,00				900.296.000,00	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													

						Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan , pengembangan dan pelatihan deteksi dini	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan , pengembangan dan pelatihan deteksi dini	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 %	300 Orang	100 Persen	929.237.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	900.296.000,00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.752.594.000,00				4.293.060.000,00	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22.500.000,00				30.000.000,00	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00

8	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00
8	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.797.035.000,00					2.787.035.000,00
8	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 Persen	21 Orang/bulan	100 Persen	2.792.035.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.782.035.000,00
8	01	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00
8	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								141.364.000,00					150.000.000,00
8	01	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	30 Paket	100 Persen	41.364.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	50.000.000,00
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	25 Orang	100 Persen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	100.000.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								618.188.000,00				616.060.000,00	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	9.567.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Paket	100 Persen	90.248.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	120 Dokumen	100 Persen	6.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	6.060.000,00
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Paket	100 Persen	99.543.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	450 Laporan	100 Persen	357.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	345.000.000,00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								156.472.000,00					150.000.000,00
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													



						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Unit	100 Persen	156.472.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	150.000.000,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143.768.000,00					143.768.000,00
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	29.768.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.768.000,00
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	104.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104.000.000,00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								873.267.000,00					416.197.000,00
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Unit	100 Persen	123.945.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	125.000.000,00
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	24 Unit	100 Persen	10.197.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit	10.197.000,00
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Unit	100 Persen	722.015.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	265.000.000,00
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Unit	100 Persen	17.110.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	12 Unit	16.000.000,00
TOTAL													136.710.744.000,00					9.747.572.000,00

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**A. Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada Rencana Strategis yang ditetapkan. Program dan Kegiatan Tahun 2024 menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 dan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kesbangpol Tahun 2024

No.	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi

				dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan tahun 2024 serta pendanaan, tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Rencana kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2024

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif ( Rp )
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								136.710.744.000
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								136.710.744.000
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.752.594.000
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22.500.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuaiSOP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Grobogan	100 %	4 Dokumen	100 %	7.500.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuaiSOP	Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Grobogan	100 %	2 Dokumen	100 %	7.500.000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuaiSOP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Grobogan	100 %	1 Laporan	100 %	7.500.000
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.797.035.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	prosentase layanan dukungan administrasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gajidan tunjangan ASN dan	Kab. Grobogan	100 Persen	21 Orang/bulan	100 Persen	2.792.035.000

		kesekretariatan yang sesuai SOP		penyelesaian laporan keuangan tepat waktu					
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Grobogan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	5.000.000
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								141.364.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	30 Paket	100 Persen	41.364.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	25 Orang	100 Persen	100.000.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah								618.188.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	9.567.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Paket	100 Persen	90.248.000

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	100 Persen	55.000.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	120 Dokumen	100 Persen	6.060.000
5	Penyediaan Bahan/Material	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Paket	100 Persen	99.543.000
E	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>156.472.000</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Unit	100 Persen	156.472.000
F	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>143.768.000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi,	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	29.768.000



			Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Semua Kel/Desa				
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	104.000.000
F	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>873.267.000</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Unit	100 Persen	123.945.000
2	Pemeliharaan Mebel	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	24 Unit	100 Persen	10.197.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Unit	100 Persen	722.015.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Unit	100 Persen	17.110.000
II	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>								<b>645.100.000</b>
A	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>								<b>645.100.000</b>
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	Persentase kelompok masyarakat yang	- Kab. Grobogan,	100 %	300 Orang	100 Persen	645.100.000

	Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Purwodadi, Semua Kel/Desa				
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>								<b>2.384.835.000</b>
A	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>								<b>2.384.835.000</b>
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	>64 %	300 Orang	>64 Persen	2.384.835.000
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>								<b>127.417.662.000</b>
A	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>								<b>127.417.662.000</b>
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	20 %	750 Orang	20 Persen	127.267.662.000

	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	20 %	250 Orang	20 Persen	150.000.000
V	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>								<b>581.316.000</b>
A	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>								<b>581.316.000</b>
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 Persen	237.100.000
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 %	150 Orang	100 Persen	344.216.000

			Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								929.237.000
A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								929.237.000
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	100 %	300 Orang	100 Persen	929.237.000

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Penetapan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan dalam mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini dan semoga Penetapan Rencana Kerja ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN GROBOGAN



**Des. DARU WISAKTI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690511 199001 1 001

